

BAB II

GAMBARAN TENTANG POLITIK

2.1 Konsep Politik

2.1.1 Pengertian Politik

Secara etimologis kata Politik berasal dari bahasa Yunani “*Ta Politika*” yang berarti hal-hal yang berkaitan dengan *Polis* (Negara atau Kota)¹. *Polis* menurut Aristoteles merupakan Negara atau Kota yang dihuni oleh masyarakat merdeka yang mempunyai hak yang sama dalam menata suatu kehidupan bersama. Pandangan Aristoteles ini konsekuen dengan pandangannya tentang manusia sebagai *zoon politicon*, atau manusia sebagai yang berkodrat politik.

Dalam pemahaman leksikal, kata *politics* (Inggris) berasal dari kata Yunani *Politicos* yang berarti dari, untuk atau yang berkaitan dengan warga negara, *Polities* (warga negara), *polis* negara atau kota sedangkan, *Politeia* (menyangkut hak-hak warga negara)². Berdasarkan definisi ini dapat dikatakan bahwa politik merupakan hal-hal yang berhubungan dengan warga negara yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam sebuah negara kota.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Politik adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang ketatanegaraan, cara memerintah dan dasar-dasar

¹ Isidorus Lilijawa, *Mengapa Takut Berpolitik*, (Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusantara, 2000), hlm. 28

² Alli Mundhofir, *Kamus Istilah Filsafat Dan Ilmu*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2001), hlm. 283

pemerintahan³. Politik sebagai ilmu pengetahuan juga mengajarkan tentang bagaimana caranya memimpin efektif dan efisien. Cara memimpin yang efektif dan efisien adalah pemimpin yang hanya sedikit memerintah atau sedikit menggunakan kekuasaan untuk memerintah, dan lebih banyak bekerja dan melayani demi kepentingan umum atau kebaikan bersama.

Aristoteles menganggap politik sebagai *master science*⁴, artinya politik dapat mempengaruhi semua segi kehidupan dan penghidupan sebagai manusia ciptaan Tuhan. David Easton mengatakan bahwa politik adalah proses interaksi yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari, di mana sejumlah nilai-nilai dialokasikan secara otoritatif bagi suatu masyarakat⁵. Kajian murni mengenai teori politik merupakan usaha untuk menyampaikan suatu maksud guna memperoleh pengetahuan yang murni mengenai dasar-dasar politik⁶.

Politik selalu menyangkut tujuan-tujuan dari seluruh masyarakat atau persoalan publik dan politik bukan untuk tujuan perorangan. Meskipun politik merupakan sebuah pilihan personal, namun pilihannya itu membutuhkan sebuah pertanggungjawaban secara penuh dan umum agar dengan sikap itu dapat terealisasi demi kesejahteraan umum (*bonum commune*). Sebab pada dasarnya politik tidak dapat terlepas dari etika. Kata Aristoteles, politik menentukan apa

³ W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), hlm. 589

⁴ Andre Bayo Ala, *Hakekat Politik, Siapa Melakukan Apa Untuk Memperoleh Apa*, (Yogyakarta: Akademika, 1984), hlm. 1

⁵ Martin Jimung, M. Si, *Politik Lokal Dan Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusatama, 2005), hlm. 16

⁶ Henry J. Schamndt, A History Of Political Philosophy, dalam Ahmad Baidlowi dan Imam Behehagi (penerj) *Filsafat Politik Kajian Historis Dari Zaman Yunani Kuno Sampai Zaman Modern* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 4.

yang harus kita lakukan dan melarang apa yang tidak boleh kita lakukan⁷. Sejak dengan itu Paus Benediktus XVI mengatakan bahwa dunia politik dan pemerintahan dewasa ini membutuhkan teladan nyata yang mampu menunjukkan arah kebenaran⁸.

2.1.2 Hakekat dan Makna Politik

Istilah politik di sini mengandung tiga arti, yang dalam bahasa Inggris lebih jelas karena diucapkan dalam tiga term yang berbeda yakni *policy*, *politics*, *polity*.

2.1.2.1 Policy

Policy menunjuk pada politik dalam arti yang lebih luas, yakni dimensi politik atau tindakan publik di segala bidang dan mencakup arah dan sasaran, isi dan program politik. Para aktor politik bukan saja para politisi dan aparat negara melainkan beraneka organisasi dalam masyarakat. Berkaitan dengan *policy* ini, pemerintah berbicara tentang pembangunan. Pembangunan itu merupakan proses yang digerakkan oleh lembaga politik, yakni oleh pemerintah. Pembangunan adalah cara kerja pemerintah dengan motif politik, yakni kemakmuran rakyat. Dengan itu pembangunan ekonomi oleh elit politik daerah berkembang menjadi komoditi politik, yaitu sumber legitimasi terhadap kekuasaan elite politik di pemerintahan daerah.

⁷ Andre Bayo Ala, *Op .Cit.*, hlm. 1

⁸ Krispurwana T. Cahyadi, SJ, *Katolik Dan Politik*, (Jakarta: Obor, 2006), hlm. 84

2.1.2.2 Politics

Politics, memaksudkan tindakan publik para aktor politik dalam arti yang sempit, seperti politisi, partai dan aparat negara. Istilah ini meliputi perjuangan meraih kekuasaan politik, politik partai dan kepentingan partai. Elit politik yang berkuasa di daerah berkecendrungan untuk memahami demokrasi hanya sebagai mekanisme untuk mendapatkan legitimasi politik dari rakyat. Karena itu bagi para politisi baik di eksekutif maupun di parlemen, demokrasi sudah dijalankan manakala ia telah mengikuti mekanisme politik.

2.1.2.3 Polity

Polity, menunjuk pada subsistem politik, yaitu bidang kenegaraan dan tata susunan politik. Politik dalam arti ini berkaitan dengan kerangka kata institusional beserta struktur, mekanisme, dan aturan permainannya.

Dengan demikian politik merupakan perwujudan *policy*, dengan bantuan *politics*, atas dasar *polity*⁹.

2.2 Tujuan Politik

Secara umum politik memiliki dua tujuan yakni tujuan yang bersifat umum dan tujuan khusus yang berhubungan dengan ideologi satu bangsa di mana aksi politik itu dijalankan. Adapun masing-masing tujuan itu adalah sebagai berikut:

⁹Dr. Norbertus Jegalus, *Filsafat Nusantara* (diktat) (kupang: FF-UNWIRA, 2018) hlm.

Pertama, **Tujuan umum**. Tujuan umum politik berkaitan dengan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat dan hidup damai yang didasarkan pada kebebasan dan keadilan. Keprihatinan utamanya adalah upaya penerapan kebijakan umum (*policy*) dalam manajemen politik. Dalam negara demokratis, pemerintah mempunyai komitmen terhadap penyelenggaraan negara dan bertanggungjawab atas komitmen untuk kesejahteraan masyarakat dan kedamaian.

Dalam menghadapi masalah-masalah negara tujuan politik itu harus tampak dalam kebijakan umum pemerintah yang terumus jelas dalam hal prioritas, program, metode, yang bersifat transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Atas dasar kebijakan umum ini, wakil rakyat dan kelompok-kelompok masyarakat bisa membuat evaluasi pelaksanaan, kinerja pemerintah dan menuntut pertanggungjawaban. Kejelasan tujuan yang terumus dalam kebijakan publik akan menunjukkan ketajaman visi seorang pemimpin dan kepedulian suatu partai politik terhadap aspirasi masyarakat. Dengan kata lain tujuan politik itu sendiri adalah menentukan arah yang jelas bagi suatu kebijakan umum dan akuntabilitasnya.

Kedua, **Tujuan khusus**. Adapun tujuan khusus dari suatu tindakan politik itu adalah sebagai berikut: **pertama**, mengusahakan agar kekuasaan yang ada dalam masyarakat atau pemerintahan dapat diperoleh, dikelola, dan diterapkan sesuai dengan norma hukum yang berlaku. **Kedua**, mengusahakan agar kekuasaan yang ada dalam masyarakat dan pemerintahan sedapat mungkin diperoleh, dikelola, dan diterapkan menurut kaidah-kaidah demokrasi. **Ketiga**, mengusahakan agar kekuasaan yang ada dalam masyarakat dan pemerintahan

sedapat mungkin diperoleh dan dikelola dalam kerangka mempertahankan prinsip negara¹⁰.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, secara luas politik tidak semata-mata merupakan proses kekuasaan pemerintahan baik dilembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif. Proses politik juga terjadi dalam proses-proses kekuasaan yang ada pada lembaga-lembaga non pemerintahan seperti partai politik dan organisasi kemasyarakatan, sebab lembaga-lembaga tersebut secara langsung mau pun tidak langsung ikut terlibat dan berpengaruh terhadap proses kekuasaan dalam negara.

2.3 Etika Politik

Satu keyakinan yang selalu ada dalam pandangan etika bahwa pada dasarnya manusia itu baik. Politik dalam pandangan etika tidak lebih dari suatu alat, sama dengan negara itu sendiri, hanyalah suatu alat yang berfungsi untuk mengatur kehidupan manusia dalam sebuah negara¹¹. Pada masa sekarang dunia politik sering mendapat citra yang selalu negatif, praktek politik dijalankan sering menggunakan cara-cara tidak baik dan menghalalkan segala cara untuk memperoleh tujuan dan kepentingan yang harus dicapai. Para kalangan elit politik sering melupakan prinsip nilai-nilai etika dan moralitas dalam berpolitik.

Sudah banyak kejadian atau realitas yang terjadi bahwa politik yang dijalankan lebih mementingkan kepentingan kelompok atau individu, berpolitik

¹⁰ Haryatmoko, *Etika Politik Dan Kekuasaan*, (Jakarta: Kompas, 2014), hlm. 33-34

¹¹ Burhanuddin Salam, *Etika Sosial: Asas Moral Dalam Kehidupan Manusia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hlm. 113

tanpa rasionalitas mengutamakan emosi dan tidak mengutamakan kepentingan negara. Seharusnya berpolitik dapat dilakukan dengan cara damai, jujur dan demokratis serta penuh tanggungjawab. Apabila kurangnya kesadaran dalam etika berpolitik maka tantangan yang akan dihadapi adalah banyaknya jual beli kekuasaan dalam dunia politik yang memberikan kesempatan kepada para pemimpin atau elit politik untuk bertindak semena-mena atau menyalahgunakan kekuasaan dan kerap kali melakukan kebohongan publik sehingga rakyat dirugikan.

Secara historis etika sebagai usaha filsafat yang lahir dari ambuknya tatanan moral di lingkungan budaya Yunani 2000 tahun yang lalu, karena mereka sudah tidak mempercayai lagi baik dan buruk; dan situasi kebobrokan moral di dalam dunia politik itu masih berlanjut sampai sekarang. Maka kehadiran etika dalam berpolitik pada masa kini sangatlah diperlukan sehingga politik sesuai atau sejalan dengan prinsip-prinsip etis yang berlaku¹².

Etika politik memang tidak dapat mengkotbahi para elit politik, tetapi dapat memberikan patokan-patokan orientasi dan pegangan normatif bagi mereka yang mau menilai kualitas tatanan dan kehidupan politik dengan tolok ukur martabat manusia¹³. Fungsi etika politik terbatas dalam masyarakat pada penyediaan alat teoritis untuk mempertanyakan serta menjelaskan legitimasi

¹² Frans Magnis Suseno, *Etika Dasar Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*, (Yogyakarta: Kanisius, 1987), hlm. 15

¹³ Frans Magnis Suseno, *Etika Politik Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, (Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama, 1994), hlm. 3

politik secara bertanggungjawab; jadi di sini etika politik tidak berdasarkan emosi, prasangka, melainkan secara rasional, obyektif dan argumentatif.

Etika politik menuntun agar segala klaim atas hak untuk menata masyarakat dan dipertanggungjawabkan pada prinsip moral. Etika politik dapat membantu masyarakat untuk mengejawatahkan ideologi negara yang luhur ke dalam realitas politik yang nyata. Misalnya dengan merefleksikan apa inti keadilan sosial, apa dasar etis kerakyatan, bagaimana kekuasaan harus ditangani sesuai martabat manusia.

Menurut Frans Magnis Suseno, etika politik adalah filsafat yang mempertanyakan praksis manusia¹⁴. Etika politik mempertanyakan tanggungjawab dan kewajiban manusia sebagai manusia bukan hanya sebagai warga negara terhadap negara, dan hukum yang berlaku. Etika berfungsi sebagai metode penyelidikan tentang nilai dan tingkah laku manusia. Etika politik dapat diartikan sebagai nilai-nilai asas moral yang disepakati bersama baik pemerintah atau masyarakat untuk dijalankan dalam proses pembagian kekuasaan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat untuk kebaikan bersama.

Adapun etika politik yang menjadi landasan dasar bagi para politisi untuk menciptakan kebijakan-kebijakan publik itu adalah sebagai berikut: Kesejahteraan Umum (*Bonum Commune*), Prinsip Solidaritas, Prinsip Subsidiaritas, Keadilan (*Fairness*), dan Tanggung Jawab. Etika politik tersebut memungkinkan politik

¹⁴ *Ibid.*, hlm 12

menjadi sesuatu yang luhur, baik dan transformatif bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

2.3.1 Kesejahteraan Umum (*Bonum Commune*)

Bonum commune adalah suatu kondisi dalam kehidupan sosial yang dapat memberikan kebaikan bagi setiap orang dan bagi masyarakat untuk bertumbuh dan berkembang secara manusiawi. *Bonum commune* sebuah kondisi yang memungkinkan agar setiap orang hidup lebih bermartabat. Yang termasuk *bonum commune* adalah kedamaian, kerukunan, persaudaraan, kejujuran, keadilan, kepedulian, struktur pemerintahan atau struktur politik yang berjuang demi kesejahteraan umum.¹⁵

Dalam konteks politik *Bonum Commune* berarti negarawan dan politisi, baik di level nasional maupun lokal, ditugasi untuk mengusahakan kepentingan umum dan bukan kelompok atau diri sendiri. Negara pun tidak memiliki tujuan pada dirinya sendiri, melainkan diciptakan untuk melayani kebutuhan masyarakat. Negara adalah untuk manusia, bukan manusia untuk negara. Maka seorang politisi Kristiani hendaknya selalu mendahulukan kepentingan umum dari pada kepentingan pribadi juga atau kepentingan golongannya atau pun kepentingan partainya. Maka politisi Kristiani hendaknya berpolitik demi kesejahteraan masyarakat dan tidak memakai kekuasaan atau politik sebagai kesempatan, untuk secara sah memperkaya diri. Implikasi konkretnya adalah bahwa segala bentuk

¹⁵ Yohanes D. Jeramu, *Teologi Moral* (diktat), (Kupang: FF-UNWIRA, 2018) hlm. 22

tindakan korupsi (waktu, uang, dan tenaga) adalah tindakan yang bertentangan dengan prinsip *bonum commune* itu sendiri¹⁶.

2.3.2 Prinsip Solidaritas

Prinsip ini menegaskan, bahwa dalam pembangunan semua harus sama beruntung dan sama berkorban, senasib sepenanggungan. Solidaritas berarti, bahwa yang lemah, miskin dan tak berdaya harus didahulukan (*preferential option for the poor*). Solidaritas bangsa kelihatan dalam bagaimana bangsa itu memperlakukan anggota-anggotanya yang “kurang berarti”. Prinsip solidaritas juga memuat tuntutan, bahwa perwujudan keadilan sosial menjadi tujuan pertama pembangunan. Dewasa ini solidaritas harus menjangkau juga generasi-generasi yang akan datang. Oleh karena itu manusia wajib menjaga keutuhan lingkungan hidup agar generasi-generasi mendatang menemukan bumi yang masih pantas dihuni¹⁷.

2.3.3 Prinsip Subsidiaritas

Prinsip ini mengatakan, bahwa lembaga lebih tinggi wajib membantu lembaga-lembaga lebih rendah, apabila mereka tidak dapat sendiri menyelesaikan keperluan-keperluan mereka. Dan dari sudut terbalik, tugas-tugas yang dapat

¹⁶ Frans Magnis Suseno, <http://pk4as.blogspot.co.id/2011/03/Sekitar-Etika-Politik-Kristiani.html>. Di akses pada tanggal 27 november. Pukul 19.00.

¹⁷ Ign. Suharyo, <http://pk4as.blogspot.co.id/2011/03/The-Catholic-Way-Kekatolikan-dan-Keindonesiaan-Kita.html>. hlm. 61-68. Di akses pada tanggal 27 november. Pukul 19.00

diselesaikan memuaskan oleh lembaga-lembaga lebih rendah, tidak boleh diambil alih oleh lembaga lebih tinggi. Prinsip itulah yang menjadi latar belakang ”Otonomi Daerah”. Apa yang dapat dikerjakan Propinsi, jangan ditarik ke Pusat oleh Pemerintah Nasional. Atau apa yang dapat diselesaikan di tingkat kelurahan, tidak perlu tingkat yang lebih tinggi (kecamatan, kabupaten bahkan propinsi) campur tangan secara langsung¹⁸.

2.3.4 Keadilan (*Fairness*)

Dalam sistem demokrasi, kedaulatan rakyat berada di tangan rakyat. Demokrasi sebagai sistem tidak hanya menyangkut hidup kenegaraan, melainkan juga hidup ekonomi, sosial, dan kultural. Dalam arti itu, demokrasi dimengerti sebagai cara-cara pengorganisasian kehidupan bersama yang paling mencerminkan kehendak umum dengan tekanan pada peran serta, perwakilan, dan tanggungjawab. Demokrasi tidak dengan sendirinya menghasilkan apa yang diharapkan¹⁹.

2.3.5 Tanggung Jawab

Singkatnya, konsep politik menurut ajaran Gereja Katolik itu lugas dan sederhana, yaitu “kesejahteraan umum” (*common good*, atau bahasa Latin-nya *bonum commune*). Politik menurut Gereja Katolik adalah memperjuangkan

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

terwujudnya kesejahteraan bersama itu. Politik bertanggungjawab untuk terciptanya *bonum commune*²⁰.

Melihat situasi sekarang ini, banyak orang Katolik semakin menjauh dan tidak mau terlibat dalam berpolitik. Padahal, panggilan Kristiani adalah persis terjun ke dalam kondisi carut-marut ini dan memperjuangkan sekuat tenaga agenda kesejahteraan umum itu. Tuhan kristiani adalah Tuhan yang menyelamatkan dengan tinggal dan berjuang dalam suka duka hidup manusia. Begitu pula setiap orang kristiani hendaknya mengikuti Dia bukan dengan menjauh, tetapi dengan berjuang dalam suka-duka kondisi politik dewasa ini.

2.4 Tradisi Dan Ajaran Gereja

2.4.1 Politik Dalam Konteks Tradisi Gereja

2.4.1.1 Santo Agustinus

Gagasan politik St. Agustinus berpusat pada konsepnya tentang “dua kota”. Terdapat dua kategori manusia yang saling bercampur. Kategori pertama, yaitu kota duniawi (kota manusia). Manusia yang menghuni kota ini hidup mengikuti sifat lahiriah mereka, mencintai diri sendiri dan merendahkan Tuhan. Kebanyakan manusia masuk dalam kategori ini. Kategori kedua, kota surgawi (kota Tuhan). Manusia yang menempati kota ini adalah mereka yang merendahkan diri dan mencintai Tuhan serta hidup dengan roh.

²⁰ *Ibid.*

Manusia pada kategori pertama tidak mencintai Tuhan, hidup menurut dirinya sendiri, maka terkena kutukan: hidup dengan penuh masalah, penuh nafsu-nafsu, pertikaian, dan kekerasan. Perlulah suatu kekuatan eksternal (dibutuhkan negara) untuk mengatur kekacauan manusia itu. Dengan adanya kekuatan negara kekacauan dapat dikendalikan dan menikmati hidup duniawi tanpa adanya kekacauan. Pada tatanan kota surgawi, manusia yang hidup dengan mencintai Tuhan, penuh kedamaian, dan keadilan sejati hanya akan terwujud dengan suatu kebangkitan (tidak tahu kapan akan terpenuhi). Kota Tuhan ini, terdiri dari manusia yang terpilih, namun tidak banyak. Hanya sebagian yang dapat dilihat secara nyata, yaitu di dalam Gereja, mungkin mereka ada di antara wakil-wakil Tuhan di dunia²¹.

2.4.1.2 Santo Thomas Aquinas

Gagasan politik St. Thomas Aquinas tampak dalam bukunya *The Governance of Rulers* (De regimine principum). Ia memperluas gagasan Aristoteles *Zoom Politikon* “manusia secara alamiah adalah binatang politik dan sosial”. Artinya manusia yang menggunakan akal dan kemampuan bicaranya untuk bekerjasama membangun komunitas politik sebagai tanggapan atas kebutuhan kelompok dan pribadi-pribadi yang menyusunnya. Dari sini, politik akan menjadi persatuan orang-orang bebas di bawah arahan suatu penguasa yang bertujuan mendorong kebaikan bersama.

²¹ <https://Ratadiajo.wordpress.com/2015/05/25/politik-menurut-agustinus-dan-thomas-aquinas-serta-penilaian-atas-pandangan-kedua-tokoh/>, diakses pda tgl 19 februari 2018, pukul 10.25

Bentuk pemerintahan terbaik menurut Aquinas adalah monarki. Pemerintahan monarki yang digagas olehnya bersifat relegius. Dia mengansumsikan ‘hierarki para malaikat dibawah satu Tuhan diproduksi di dunia dengan adanya beragam tingkatan dalam Gereja, dan dalam masyarakat, serta masing-masing mengemban posisinya di bawah satu raja tunggal”. Dapat diandaikan, bahwa sistem pemerintahannya berdasar pada hukum Ilahi (Tuhan menjadi pimpinan, penguasa tertinggi). Bahkan setelah sistem itu diterapkan dalam pemerintahan duniawi, Tuhan tetap menjadi yang utama²².

2.4.2 Politik Dalam Konteks Ajaran Gereja

2.4.2.1 Konsili Vatikan II

Sama sekali sesuai dengan kodrat manusia menemukan struktur-struktur politik berdasarkan hukum yang selalu semakin baik dan tanpa deskriminasi membuka kesempatan efektif bagi semua warga negara, untuk secara bebas dan aktif berperan serta baik dalam menetapkan dasar-dasar hukum bagi negara dan bidang-bidang serta sasaran pelbagai lembaganya, maupun dalam pemilihan pejabat pemerintah dan supaya kerja sama para warga negara dijiwai kesadaran akan kewajiban mereka dalam kehidupan sehari-hari negara berhasil dengan baik dibutuhkan tata hukum positif yang mencantumkan pembagian tugas-tugas serta lembaga-lembaga pemerintah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, perlindungan hak-hak efektif dan tidak merugikan siapa pun²³.

Bertolak dari isi dokumen ini, dapat dikatakan bahwa kita dituntut untuk kerja sama yang baik dalam menjalankan kedua entitas yang berbeda ini, dan di samping kerja sama perlu juga menghadirkan kesadaran yang baik, sehingga segala sesuatu yang dicita-citakan atau yang idealnya dapat dicapai

²² *Ibid.*

²³ Konsili Vatikan II, *Gaudium Et Spes “Konstitusi Pastoral Tentang Gereja Di Dunia Dewasa Ini”*, dalam R. Hardawiryana (penerj), *Dokumen Konsili Vatikan II* (Jakarta: Obor, 1993), No. 75, selanjutnya akan digunakan singkatan *GS* dan diikuti dengan nomor. Artikelnya

dengan baik dalam kehidupan setiap hari demi kebaikan bersama. Kebaikan bersama itu di dalamnya termuat keseimbangan antara Gereja dan politik. Keseimbangan yang dijalankan sungguh-sungguh akan mengakibatkan tidak ada satu pihak pun yang dikorbankan.

Mewujudkan kesejahteraan umum, berarti seluruh kondisi kehidupan sosial dari aspek ekonomi, politik maupun budaya yang mungkin setiap orang mencapai kesempurnaan kemanusiaannya. Hak-hak pribadi senantiasa dialami dalam konteks mewujudkan kesejahteraan umum²⁴. Dengan demikian partisipasi politik berkaitan dengan keterlibatan demokratis yang ikut ambil bagian dalam proses pengambilan keputusan merupakan cara yang terbaik untuk menghormati martabat dan kebebasan masyarakat.

Pemerintah hanyalah alat yang digunakan oleh masyarakat untuk bekerja sama menciptakan kesejahteraan. Dengan demikian nampak perkembangan-perkembangan baru dalam bidang politik yakni bertambahnya partisipasi masyarakat dalam pengurusan negara, berkurangnya penjajahan dan bertambahnya keterlibatan pemerintah untuk menciptakan kesejahteraan umum itu sendiri, maka pribadi manusia harus dihargai semua warga negara serta ikut ambil bagian dalam kesejahteraan umum, dan memberikan perhatian yang lebih kepada warga masyarakat yang kurang beruntung²⁵.

²⁴ Michael J. Schultheis SJ, dalam F. Budi Harman dan P. Prasetyohadi (penerj), *Pokok-Pokok Ajaran Sosial Gereja* (Yogyakarta: Kanisius, 1998) hlm. 34

²⁵ *Ibid.*, hlm. 61

2.4.2.2 *Sollicitudo Rei Socialis*

Dalam *Sollicitudo Rei Socialis* (art 12), Gereja Katolik mengklaim hak ikut bicara dalam masalah sosial-ekonomi, dan untuk mengajak dan mendesak-desak hati nurani manusia. Demi keprihatinan sosial ini Gereja mendesak agar masalah sosial dan ekonomi dilihat dan diterima sebagai tantangan terhadap tanggungjawab manusia, kewajiban sosial adalah kewajiban moral dan karen itu Gereja mengingatkan para anggota Gereja agar tidak menarik diri dari tanggung jawab sosial itu²⁶.

2.4.2.3 *Quadragesimo Anno*

Dalam *Quadragesimo Anno* (QA) dinyatakan bahwa Gereja ikut bicara dalam masalah sosial dan ekonomi sebagai masalah etik²⁷. Sebab masalah-masalah ekonomi tidak mengikuti semacam hukum alam yang mesti diindahkan, melainkan termasuk tanggung jawab manusia atas kelangsungan hidup manusia secara manusiawi jika menemukan tujuannya yang terakhir dan transenden²⁸.

Dengan keterlibatan atau aksi ini, Gereja ingin menunjukkan pengabdianya kepada rencana ilahi yang ingin mengarahkan segala sesuatu pada kepenuhan yang hidup dalam Kristus (bdk. Kol.1:9) dan yang dikaruniakan kepada tubuh-Nya. Selain itu, Gereja hendak melaksanakan

²⁶ Eddy Kristiyanto,Ofm, *Sakramen Politik Mempertanggungjawabkan Memoria*, (Yogyakarta: Lamalera,2008) hlm. VII, di dalam Sakramen Politik Eddy Kristiyanto mengutip Ensiklik *Sollicitudo Rei socialis*.

²⁷ *Ibid*

²⁸ *Ibid., hlm. 8*

panggilannya yang pokok, yaitu untuk menjadi Sakramen atau tanda serta sarana untuk bersatu secara mendalam dengan Allah dan untuk kesatuan seluruh Umat Allah. Tidak ada evangelisasi tanpa keterlibatan sosial dan tidak ada pewartaan iman tanpa perjuangan untuk keadilan²⁹.

Keberadaan Gereja sebagai satu persekutuan umat beriman didasarkan pada Misteri Allah Trinitas. Allah Trinitas, sebagaimana pernah diungkapkan teolog Leonardo Boff, adalah Allah persekutuan, *perikhoresis*³⁰. Dinamika persekutuan Trinitas ini adalah Cinta. Allah tidak berbuat lain kecuali mencintai. Cinta *perikoresis* ini tidak hanya menyata di antara ketiga pribadi (trinitas imanen), tetapi juga menyata kepada dunia (trinitas ekonomis)³¹. Oleh karena cinta kepada dunia Allah mengutus Putra dan Roh Kudus kepada manusia agar manusia yang tercerai-berai oleh dosa, hidup dalam persekutuan cinta. Demi persekutuan cinta ini, Gereja dipanggil selain untuk menghidupi persekutuan, menjadi sarana atau sakramen keselamatan di tengah dunia, juga senantiasa berjuang menghantar semua orang kepada persekutuan dengan Allah.

Tindakan persekutuan semua orang ke dalam persekutuan cinta dengan Allah ini mengandaikan juga pada Gereja ada keterlibatan, keberpihakan. Seperti Allah yang mengutus Putra-Nya ke tengah dunia untuk mengemban misi penyelamatan, demikian juga Gereja dipanggil untuk masuk kedalam dunia, terlibat dengan aneka persoalan hidup manusia. Setiap orang dibaptis,

²⁹ *Ibid.*, hlm. 5

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid. Hlm. 6*

yang diikat dengan Kristus yang berinkarnasi dipanggil untuk masuk ke dalam dunia dan mengemban misi penyelamatan dalam cara hidup tertentu³².

Dalam konteks ini, beriman sesungguhnya tidak hanya terbatas pada relasi vertikal-personal antara seorang pribadi atau suatu komunitas iman dengan Allah, tetapi juga merambat dalam relasi horizontal-sosial-politis antara satu pribadi dengan pribadi yang lain, antara satu komunitas iman dengan komunitas iman yang lain. Matra horizontal-sosial-politis ini tidak lain adalah medan perwujudan iman kepada Allah³³. Orang yang beriman adalah orang yang menyerahkan diri dalam melaksanakan tugas hidupnya dan yang melibatkan diri dalam persoalan sosial-politis, untuk memberikan jawaban kepada Allah yang memanggil dia. Karena itu, Gereja bukan terutama mereka yang berkumpul dalam gedung Gereja untuk mengungkapkan imannya kepada Allah, melainkan mereka semua yang melibatkan diri ke dalam usaha setiap hari, yaitu pada saat sejarah sekarang ini ke dalam pergulatan sosial-politis.

Gereja adalah Umat Allah dalam perjalanan. Gereja bukan gudang kesucian yang menyelamatkan dunia dengan memberi pengarahan serta ajaran dan dengan mengisi dunia yang jahat dengan rahmat sakramental; Gereja menyucikan dunia dengan menemukan dan menyuarakan rahmat yang sudah selalu berkarya dalam usaha orang. Dengan kata lain, Gereja menyucikan dunia, jika orang Kristen menghadapi tantangan hidup perorangan dan melibatkan diri pada pergulatan sosial-politis dalam kepercayaan akan Allah yang menyelamatkan.

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*

Bertolak dari hal di atas ini Gereja berusaha untuk menikmati kebebasan bertindak yang secukupnya untuk mengusahakan keselamatan manusia dan kebebasan itu begitu khas bagi Gereja sehingga barang siapa menentangnya bertindak melawan kehendak Allah dan kebebasan Gereja juga merupakan asas dasar dalam hubungan antara Gereja dan pemerintah-pemerintah serta seluruh tata masyarakat³⁴.

³⁴ Konsili Vatikan II, *Dignitatis Humanae* “Pernyataan Tentang Kebebasan Beragama”, dalam R. Hardawiryana SJ, (penerj), *Dokumen Konsili Vatikan II* (Jakarta: Obor, 1993), No. 13, selanjutnya akan digunakan singkatan *DH* dan diikuti dengan no. Artikelnya